

**IMPLEMENTASI PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAYANAN PERNIKAHAN PADA  
MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKUNCEN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MUHAMAD KHOIRUL MUNA- 25000118130189  
2022-SKRIPSI**

Layanan pernikahan merupakan salah satu sektor yang terkendala akibat pandemi Covid-19. Untuk memastikan pelayanan tersebut tetap terselenggara secara aman, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. P-002/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang mengatur upaya pencegahan COVID-19 dalam layanan nikah dan dilaksanakan oleh seluruh Kantor Urusan Agama, termasuk KUA Kecamatan Pekuncen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penerapan protokol kesehatan pada layanan nikah pada masa pandemi di KUA Kecamatan Pekuncen. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Informan penelitian ditentukan berdasarkan kapasitas informasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya mengenai topik penelitian. Informan utama terdiri dari Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Kepala KUA Kecamatan Pekuncen, Staff KUA Kecamatan Pekuncen, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan Pekuncen. Adapun informan triangulasi meliputi Sekretaris Camat Pekuncen, dan penerima layanan nikah KUA Kecamatan Pekuncen. Penelitian ini difokuskan pada pendekatan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, meliputi 6 variabel yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan telah teraktualisasi dengan baik. Ketersediaan sumber daya yang optimal dan sikap positif pelaksana juga mendukung proses implementasi kebijakan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah masih perlu meningkatkan komunikasi terhadap organisasi pelaksana maupun masyarakat penerima layanan, serta memperkuat wewenang dan mekanisme pengawasan untuk menanggulangi kendala yang diakibatkan oleh lingkungan sosial budaya di masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Protokol Kesehatan; Pelayanan Nikah; COVID-19.